

**ASPEK *DE FACTO* DAN *DE JURE* PEMERINTAHAN BARU TALIBAN  
DI AFGHANISTAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**Adelia Tri Ayu Ningtyas**

**07041381924204**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“Aspek *De Facto* dan *De Jure* Pemerintahan Baru Taliban di Afghanistan”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**Adelia Tri Ayu Ningtyas**

**07041381924204**


Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Zulfikri Suleman, M.A

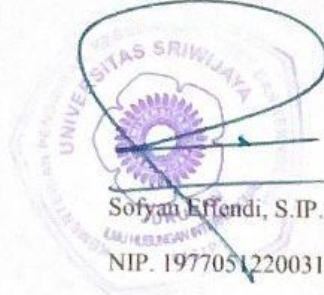
NIP. 195907201985031002



20 Desember 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

# HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

ASPEK *DE FACTO* DAN *DE JURE* PEMERINTAHAN BARU TALIBAN DI  
AFGHANISTAN

### SKRIPSI

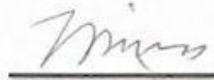
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 4 Januari 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

#### Tim Penguji Skripsi

Pembimbing:

Tanda Tangan

Dr. Zulfikri Suleman, M.A  
NIP. 195907201985031002



Penguji:

Tanda Tangan

1. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.  
NIP. 198708192019031006



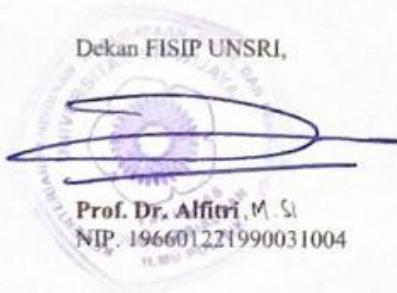
2. Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn  
NIDN: 0009029110



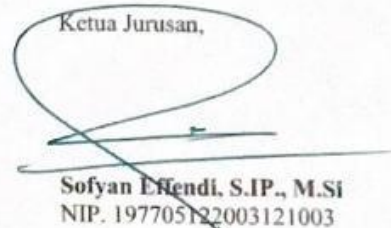
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan,



Prof. Dr. Alfitri, M. Si  
NIP. 196601221990031004



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adelia Tri Ayu Ningtyas  
NIM : 07041381924204  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 5 September 2001  
Program Studi/Jurusan : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Aspek *De Facto* dan *De Jure* Pemerintahan Baru Taliban di Afghanistan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,  
Yang membuat pernyataan,



Adelia Tri Ayu Ningtyas  
NIM. 07041381924204

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

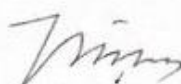
1. Mama (Deka Erliyana) dan Papa (Bambang Hariadi) tersayang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Seluruh pengorbanan yang telah diberikan oleh Mama dan Papa tentunya sangat memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara-saudara penulis yang sangat penulis sayangi dan selalu bisa diandalkan ketika penulis membutuhkan bantuan.
3. Almamater yang penulis banggakan, Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Hubungan Internasional.

## ABSTRAK

Pengakuan *de jure* adalah hal yang penting dalam Hubungan Internasional. Apalagi dunia saat ini berada dalam sebuah kondisi globalisasi dan modernisasi yang semakin gencar, sehingga membuat sebuah negara semakin membutuhkan negara lainnya. Sebuah negara tentunya tak bisa hidup sendiri, pastilah membutuhkan negara lain untuk kelangsungan hidup negaranya. Penelitian ini menjelaskan mengenai alasan dunia internasional yang hingga saat ini belum mau memberikan pengakuan resmi (*de jure*) kepada pemerintahan baru di Afghanistan yakni rezim Taliban. Dunia internasional masih menunggu perkembangan selanjutnya dari rezim yang saat ini berhasil menguasai seluruh wilayah di Afghanistan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep konstruktivisme. Menurut perspektif konstruktivisme, ada beberapa konsep yang menjadi jangkauan pembahasannya, seperti identitas, nilai, norma, ideologi dan juga kepercayaan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan untuk jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Referensi beserta data-data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder didapatkan dari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, penelitian, laporan, dokumen dari internet, surat kabar dan juga internet. Juga sempat diadakan wawancara satu kali dengan seseorang yang sangat kompeten di bidang Hubungan Internasional yakni mantan diplomat Indonesia dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwasanya dunia internasional belum mau memberikan pengakuan *de jure* kepada Taliban dikarenakan Taliban telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan hukum internasional. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Taliban sungguh bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Tentunya dunia internasional menginginkan Taliban untuk menghentikan segala pelanggaran kemanusiaan yang telah mereka perbuat sehingga dengan begitu nantinya Taliban bisa mendapatkan pengakuan dari dunia internasional.

**Kata Kunci : Rezim Taliban, Afghanistan, Pengakuan De Jure, Hak Asasi Manusia, Inklusivitas, Demokrasi**

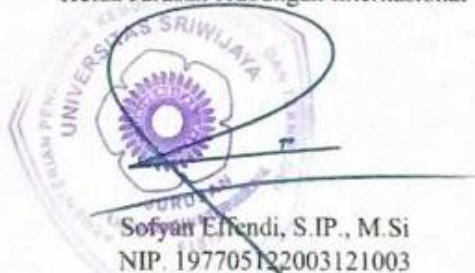
Pembimbing



Dr. Zulfikri Suleman, M.A

NIP. 195907201985031002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## ABSTRACT

De jure recognition is important in International Relations. Moreover, the world is currently in a condition of globalization and modernization which is increasingly intensive, thus making a country increasingly need other countries. Of course, a country cannot live alone, it definitely needs other countries to defend its country's life. This research explains the international reasons for the world's unwillingness to give official (de jure) recognition to the new government in Afghanistan, namely the Taliban regime. The international world is still waiting for further developments from the regime that currently controls all areas in Afghanistan. In this study, the authors use the concept of constructivism. According to the constructivism perspective, there are several concepts that become the scope of the discussion, such as identity, values, norms, ideology and also beliefs. The author uses qualitative research methods and for this type of research is descriptive. References along with the data collected for this research come from secondary data. Secondary data was obtained from various kinds of literature such as books, journals, research, reports, documents from the internet, newspapers and also the internet. A one-time interview was also held with someone who is very competent in the field of International Relations, namely a former Indonesian diplomat from the Indonesian Ministry of Foreign Affairs.

The results of this international research explain that the world does not want to give de jure recognition to the Taliban because the Taliban have committed actions that violate international norms and law. The policies made by the Taliban are totally against the values of democracy and human rights. Of course the international community wants the Taliban to stop all the human violations they have committed so that later the Taliban can gain recognition from the international community.

**Keywords: The Taliban Regime, Afghanistan, De Jure Recognition, Human Rights, Inclusivity, Democracy**

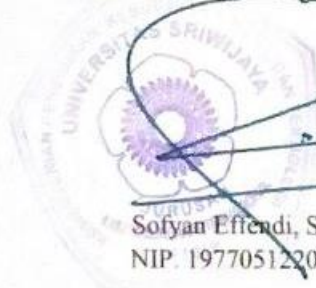
Pembimbing



Dr. Zulfikri Suleman, M.A

NIP. 195907201985031002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan juga hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Aspek *De Facto* dan *De Jure* Pemerintahan Baru Taliban di Afghanistan” ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Tentunya penulis menyadari bahwasanya skripsi ini bisa terselesaikan dikarenakan adanya bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam pembuatan skripsi serta masukan dalam pembuatan skripsi hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Muchamad Yustian Yusa S.S.,M.Si dan Ibu Cynthia Azhara Putri , S.H., M.Kn sebagai dosen pembahas yang telah memberikan banyak saran/masukan sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
3. Seluruh dosen pengajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI.
4. Kedua orang tua penulis yaitu Mama dan Papa yang selalu memberikan *support* baik berupa materil, moral, dan doa sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sarjana.
5. Saudara Penulis yaitu Kak Ari, Kak Dimas, Ayuk Putri, Ayuk Meri yang selalu memberikan semangat serta dukungan baik secara materil dan juga doa dikala penulis mengerjakan skripsi.
6. Sahabat-sahabat penulis, Indah Nadhila Kinantiani Agsa dan Desva Rusman yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.



7. Sahabat-sahabat penulis sejak awal kuliah hingga sekarang yaitu Anggun Septiarani, Hana Fairuz Akbar Lubis, Nadilah Andini, dan Vania Meisawitri yang selalu menemani penulis semasa kuliah dan selalu memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
8. Admin HI Palembang (Mba Anti dan Mba Sertin) yang telah membantu penulis ketika proses penyelesaian administrasi kampus selama masa perkuliahan.
9. Teman kelas saya di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional kelas A Kampus Palembang serta angkatan 2019 lain-nya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya.
10. Semua pihak yang turut membantu serta memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di dalam halaman ini.

Palembang, 11 Desember 2022

Adelia Tri Ayu Ningtyas

NIM 07041381924204

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	15
1.1 Latar Belakang Masalah .....	15
1.2 Rumusan Masalah .....	21
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
1.4.1 Kegunaan Teoritik .....	21
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
2.2 Landasan Konseptual .....	27
2.2.1 Konsep Negara .....	27
2.2.2 Konsep Konstruktivisme.....	29
2.3 Alur Pemikiran.....	31
2.4 Argumen Utama.....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
3.1 Desain Penelitian .....	32
3.2 Definisi Konsep.....	32
3.3 Fokus Penelitian .....	32
3.4 Unit Analisis .....	34
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	35
3.8 Teknik Analisa Data .....	35
3.9 Jadwal Penelitian .....	35

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>36</b>
4.1 Sejarah Taliban.....	36
4.2 Kondisi Afghanistan setelah 2001.....	46
4.3 Kembalinya Taliban ke Tampuk Kekuasaan.....	51
4.4 Keberadaan Taliban .....	55
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
5.1 Aspek <i>De Jure</i> Pemerintahan Baru Taliban di Afghanistan .....	58
5.2 Alasan Dunia Internasional tidak memberikan pengakuan <i>De Jure</i> kepada Taliban .....	65
1. Pemerintahan Taliban tidak mampu menciptakan Pemerintahan yang Inklusif .....	65
2. Pemerintahan Taliban dianggap sebagai sebuah ancaman .....	69
3. Pemerintahan Taliban melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	72
5.3 Persepsi Negara-Negara yang Menjalin Komunikasi dengan Taliban.....	83
5.4 Peluang Taliban Mendapatkan Pengakuan <i>De Jure</i> .....	87
<b>BAB VI KESIMPULAN &amp; SARAN.....</b>	<b>90</b>
6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>
Pernyataan dari DK PBB Terkait Situasi di Afghanistan .....	100
Resolusi DK PBB Terkait Situasi di Afghanistan .....	101
Proses Wawancara via Zoom.....	102
Tabel Hasil Wawancara .....	103

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka .....	23
Tabel 2 Alur Pemikiran.....	31
Tabel 3 Fokus Penelitian.....	33
Tabel 4 Komposisi Etnis dalam Kabinet Taliban .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Taliban mengendarai mobil di jalanan Afghanistan setelah terbunuhnya pemimpin Al-Qaeda, Ayman Al Zawahiri .....	71
Gambar 2 Kondisi kamp pengungsian yang ada di Kandahar, Afghanistan Selatan.....	81

## DAFTAR SINGKATAN

ANSF	: <i>The Afghan National Security Forces</i>
AS	: Amerika Serikat
CEDAW	: <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
COVID-19	: Corona Virus Disease 2019
CSO	: <i>Central Statistics Organisation</i>
DAB	: <i>Da Afghanistan Bank</i>
DUHAM	: Deklarasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
FBI	: <i>Federal Bureau of Investigation</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: <i>Human Rights Watch</i>
IED	: <i>Improvised Explosive Device</i>
ILC	: <i>International Law Commission</i>
ISKP	: <i>Islamic State Khorasan Province</i>
MoWA	: <i>Ministry of Women's Affairs</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OEF	: <i>Operation Enduring Freedom</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SIGAR	: <i>Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
WFP	: <i>World Food Programme</i>
WTC	: <i>World Trade Center</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang Masalah

Pengakuan terhadap sebuah negara baru atau sistem pemerintahan baru merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan politik internasional dikarenakan hal itu mampu menjamin bahwa negara tsb tersebut memiliki kedudukan yang sesuai, yakni sebagai organisme politik yang mandiri, memiliki kedaulatan serta merdeka. Dalam Hukum Internasional, disebutkan ada dua jenis pengakuan yakni *de facto* dan *de jure*. *De facto* sendiri memiliki arti “kenyataan yang sesungguhnya” (A. Masyhur Effendi, 2011). Jadi, pengakuan *de facto* adalah pengakuan secara kenyataan, berdasarkan fakta bahwasanya negara itu ada (*exist*). Jadi bisa dikatakan, pengakuan *de facto* ini berkaitan erat dengan eksistensi atau keberadaan suatu negara. Pengakuan *de facto* ini sifatnya sementara dikarenakan pengakuan ini ada sembari menunggu perkembangan selanjutnya dari negara yang baru berdiri tsb. Apabila negara tsb sudah menunjukkan kemampuannya dan mampu untuk memenuhi setiap hak dan kewajiban maka biasanya barulah negara tsb mendapat pengakuan secara resmi oleh negara lain. Pengakuan secara resmi oleh sebuah negara terhadap negara/pemerintahan baru berdasarkan Hukum Internasional disebut dengan pengakuan *de jure* (Putri, 2022).

Beberapa ahli menyepakati bahwasanya pengakuan *de jure* adalah hal yang penting dalam Hubungan Internasional. Apalagi dunia saat ini berada dalam sebuah kondisi globalisasi dan modernisasi yang semakin gencar, sehingga membuat sebuah negara semakin membutuhkan negara lainnya. Sebuah negara tentunya tak bisa hidup sendiri, pastilah membutuhkan kerja seperti kerja sama bilateral ataupun multilateral. Akan tetapi, sebelum sebuah negara menyatakan kemerdekaannya lalu menjalin hubungan dengan negara lain itu diperlukan adanya pengakuan dengan bermacam-macam persyaratan seperti kemampuan untuk

menjalin hubungan dengan komunikasi yang sempurna dengan negara-negara lain di segala bidangnya baik itu secara ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dalam hukum internasional ditekankan kalau pengakuan bukanlah hal yang sederhana karena menyertakan hubungan politik dan hukum dari dua negara atau bahkan lebih. Dalam permasalahan pengakuan ini, unsur hukum serta politik sangat sulit untuk dipisahkan secara nyata sebab baik penerimaan maupun penolakan untuk mengakui sebuah negara atau pemerintahan sering dipengaruhi oleh unsur politik, yang berakibat mempunyai ikatan hukum (Elsa & Regika, 2020).

Pengakuan pemerintah baru adalah sebuah pernyataan dari suatu negara, bahwasanya negara tersebut telah siap dan bersedia untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan yang baru diakui sebagai sebuah aktor yang bertindak untuk dan atas nama negaranya. Pengakuan pemerintah ini sangatlah penting, karena tidak memungkinkan apabila sebuah negara mengadakan hubungan resmi dengan negara lain yang tidak mengakui pemerintahannya secara sah. Penerimaan pemerintahan dan bergantinya pemerintahan baru di sebuah negara seringkali menimbulkan situasi politik yang memanas dari kedua belah kubu yang terlibat. Situasi ini kerap kali terjadi dikala pergantian pemerintahan tersebut dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang konstitusional atau cara-cara yang sah, cara-cara yang terjadi secara normal berdasarkan kehidupan politik di tempat tersebut entah itu lewat pemilihan umum, ataupun yang lainnya. Permasalahannya disini ialah, pergantian suatu pemerintahan dengan cara-cara yang tak konstitusional. Cara-cara tersebut bisa dilakukan dengan jalan revolusioner atau melalui langkah-langkah ekstra yuridik, contohnya *coup d'etat* (Kudeta), revolusi, *insurrection* (pemberontakan), dan lain-lain (A. Masyhur Effendi, 2011).

Taliban, yang sering disebut sebagai sebuah gerakan mujahidin juga pernah memerintah sebagian besar Afghanistan mulai dari tahun 1996 hingga 2001. Di tahun 2001, Taliban menjadi bahan perbincangan dan menjadi sorotan dunia internasional tepatnya karena



peristiwa 9/11. Saat itu Taliban menjalin hubungan erat dengan Al-Qaeda selaku pelaku 9/11. Amerika Serikat yang saat itu amat marah langsung melakukan invasi ke Afghanistan dan menyerang Taliban, akibat dari invasi ini memakan banyak sekali korban jiwa. Amerika Serikat menyebut tindakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap terorisme internasional. Tindakan AS ini merupakan sebuah tanggapan atas perbuatan yang dilakukan Taliban yakni sebagai tempat persembunyian kelompok teroris internasional Al Qaeda, Setelah berhasil menggulingkan pemerintahan Taliban, AS kemudian memiliki tujuan lain yakni AS ingin membentuk pemerintahan baru Afghanistan dan juga ingin membantu memperkuat militer Afghanistan (BBCNEWS, 2022).

Setelah 2001, perempuan Afghanistan sudah mulai ikut serta di banyak bagian dalam masyarakat salah satunya di kancah perpolitikan. Hal ini merupakan hal yang menggembirakan bagi kaum perempuan disana. Para perempuan Afghanistan ketika masa itu bisa memegang beberapa posisi penting seperti, menteri, gubernur, polisi, dubes dan pasukan keamanan, selain itu ada juga tanda kemajuan lain yakni perlindungan bagi kaum minoritas etnis dan agama yang disebutkan di Konstitusi Afghanistan 2004 (Balairung Press, 2022)

Pada tahun 2005, Taliban mulai berkumpul kembali dalam jumlah yang lebih besar dan terus menyerang pasukan AS, menjadikannya tahun paling mematikan bagi pasukan AS sejak perang dinyatakan dimulai pada tahun 2001 (AlJazeera, 2009). Taliban ingin membebaskan Afghanistan dari pengaruh AS. Taliban beranggapan kalau selama ini pemerintahan Afghanistan ialah pemerintahan boneka. Apalagi di tahun 2012-2013 Taliban makin menjadi-jadi, kelompok ini kerap kali melakukan aksi-aksi seperti bom bunuh diri, penculikan, peledakan dan lainnya (Dominguez, 2013).

Pada 7 September 2021, hampir 20 tahun setelah pimpinan AS menyatakan keberhasilannya menggulingkan kelompok Taliban, Taliban mengumumkan kesuksesannya dalam “pengambilalihan kekuasaan pemerintah” Afghanistan. Pengumuman itu muncul

beberapa minggu setelah Taliban berhasil mengambil kembali kendali negara Afghanistan dengan bersamaan runtuhnya mantan pemerintah Afghanistan yang saat itu didukung juga oleh Amerika Serikat dan pasukan keamanannya. Taliban berhasil merebut provinsi demi provinsi sebelum mengambil ibu kota Kabul pada 15 Agustus 2021 (KOMPAS, 2021). Masyarakat Internasional pun dibuat bingung dengan bagaimana cara Taliban akan memerintah Afghanistan dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.

Para pemimpin Taliban sendiri masih memikirkan hal ini, karena mereka juga tampak terkejut dengan cepatnya runtuhnya pemerintah Ghani. Pasukan asing yang telah setuju untuk meninggalkan negara, dikejutkan oleh kemajuan kedatangan pasukan Taliban yang dipercepat sehingga mereka harus segera keluar dari Afghanistan. Banyak pemerintah Afghanistan yang didukung oleh negara Barat melarikan diri, sementara ribuan rekan senegarannya dan orang asing yang takut akan kekuasaan Taliban bergegas mencari tempat untuk penerbangan ke luar negeri. Presiden Ashraf Ghani meninggalkan ibu kota dengan helikopter ke negara tetangga, Uzbekistan (BBCNews, 2021). Hanya dalam beberapa minggu saja, Taliban menguasai seluruh wilayah Afghanistan. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang tidak berhasil mereka lakukan dalam tugas pertama mereka berkuasa di Afghanistan yakni antara tahun 1996 dan 2001.

Setelah menguasai Kabul, Taliban pun membentuk pemerintahan sementara. Mereka menunjuk Mullah Hassan Akhund sebagai perdana menteri sementara dan juga menunjuk dua wakil perdana menteri, Mullah Abdula Ghani Baradar (yang telah memimpin kantor politik Taliban di Doha) dan Mawlawi Abdul Salam Hanafi (anggota tim perunding Doha). Pemimpin spiritual gerakan tersebut, Hibatullah Akhundzada, akan melanjutkan sebagai Amir al-Mominin (Dönmez, 2021). Taliban juga mulai menerapkan aturan-aturan bagi masyarakat Afghanistan. Taliban amat keras terhadap aturan-aturan tsb baik aturan terhadap kaum perempuan dan juga kaum lelaki. Taliban tidak mau melakukan kompromi dengan masyarakat disana dan menutup diri untuk melakukan diskusi atau membahas tentang penafsiran versi

mereka. Kelompok pemberontak yang berubah menjadi penguasa dan merebut kekuasaan pada Agustus 2021 lalu, memasang pemerintahan sementara yang semuanya laki-laki setelah hampir 20 tahun intervensi militer asing pimpinan AS di negara Asia Selatan yang dilanda perang itu (Boy, 2021).

Setelah berkuasa kembali, Taliban pun dituding sedang berusaha untuk menciptakan struktur tentara yang utuh untuk Afghanistan. Struktur ini terdiri dari perwira dan tentara yang pernah melayani rezim lama. Namun banyak juga tentara Pemerintah Afghanistan lama yang pada akhirnya kembali ke kehidupan sipil dan berusaha untuk menyembunyikan identitas mereka dikarenakan mereka merasa takut jika suatu saat Taliban akan memberikan balasan kepada mereka. Taliban ingin membentuk pasukan dalam jumlah besar yang sesuai dengan kebutuhan negara serta kepentingan nasional. Namun, jumlahnya tidak terperinci. Taliban pun telah melakukan perbaikan terhadap setengah dari 81 helikopter serta pesawat yang diduga tidak bisa dipakai oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat ketika penarikan pasukan yang ricuh tahun lalu (Wardhana, 2022).

Satu tahun setelah kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada 2021 lalu, Taliban mendesak pengakuan dari negara-negara dunia khususnya negara Muslim atas pemerintahannya yang sekarang. Taliban juga meminta negara lain seperti China untuk berinvestasi di Afghanistan (Republika, 2021). Akan tetapi, belum ada negara di dunia ini yang mengakui pemerintahan Taliban bahkan negara-negara barat cenderung menjaga jarak. Para sekutu NATO pun ikut tidak mengakui pemerintah Taliban yang berhasil merebut kekuasaan di 2021 lalu (Republika, 2022).

Afghanistan memiliki rakyat, mempunyai wilayah-wilayah termasuk adanya aturan-aturan tentang batas-batas wilayahnya dengan negara tetangga serta sudah ada pemerintahan

yang memimpin. Jadi, bisa dikatakan Taliban merupakan pemerintahan *de facto* di Afghanistan saat ini. Akan tetapi, Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban haruslah tetap menyanggupi keempat syarat di atas supaya tetap bisa mempertahankan status kenegaraannya (Sena, 2021). Taliban mesti mendapatkan pengakuan secara *de jure* yakni pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain.

Lalu, setelah Taliban kembali mendapatkan kekuasaannya, kondisi rakyat pun memburuk karena tidak ada pembangunan dan pemulihan. Datangnya musim dingin membawa ancaman nyata berupa krisis kelaparan (KOMPAS, 2021). Ditambah lagi, Amerika membekukan aset Afghanistan yang ada di AS. Amerika Serikat telah melakukan penyitaan sebanyak hampir 9,5 miliar dollar AS (Rp 135,3 triliun) aset milik bank sentral Afghanistan sejak Taliban berhasil mengambil kekuasaan. Afghanistan mengalami kelaparan hingga kemiskinan kronis, skala penderitaan di Afghanistan terus meningkat di banyak wilayah lebih dari setengah populasi negara itu sekarang hidup di bawah garis kemiskinan. Hampir 23 juta orang mengalami rawan pangan, banyak diantaranya sangat parah, dan lebih dari dua juta anak menderita kekurangan gizi (UNNews, 2022).

Berdasarkan survei Bank Dunia, 70 persen rumah tangga yang disurvei tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan. Kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi rakyat pun merosot. Ditambah lagi pada Juni 2022, gempa berkekuatan 5,9 melanda wilayah tengah Afghanistan, menewaskan lebih dari 1.000 orang (KOMPAS, 2021). PBB mengatakan bahwa Afghanistan berada di tingkat krisis kemanusiaan terburuk yang pernah terjadi di dunia. Kekeringan yang terjadi karena adanya perubahan iklim pun tentunya memperburuk gangguan yang disebabkan oleh pengambilalihan negara yang ricuh karena ulah Taliban. Jutaan warga pun mesti memilih antara migrasi serta kelaparan. Pengangguran massal, runtuhnya pasar perumahan, dan meningkatnya angka malnutrisi hanyalah beberapa dari banyak tanda nyata dari bencana ekonomi yang melanda negara tsb (CNN Indonesia, 2021). Hal ini tentunya

memperburuk kondisi Afghanistan dikala kepemimpinan Taliban.

Dari uraian yang penulis jelaskan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya pemerintahan baru Taliban hanya mampu mendapatkan pengakuan secara *de facto* saja. Dengan tidak adanya pengakuan *de jure* dari dunia internasional lantas membuat Afghanistan dibawah pemerintahan Taliban tidak mampu menjalin kerja sama dengan negara lain. Hal ini membuat Taliban kesulitan untuk melakukan pemulihan serta pembangunan diberbagai sektor sehingga berakibat kondisi rakyat pun memburuk dan terjadilah kelaparan. Lalu, muncul pertanyaan mengenai alasan mengapa dunia internasional terutama negara-negara Barat tidak menerima pemerintahan Taliban. Tentunya pertanyaan tersebut akan diangkat oleh penulis menjadi skripsi dengan judul “Aspek *De Facto* dan *De Jure* Pemerintahan Baru Taliban di Afghanistan”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka muncul pertanyaan yaitu “Mengapa rezim Taliban tidak mendapatkan pengakuan *de jure* dari Negara-Negara dunia?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan rezim Taliban tidak bisa diterima oleh dunia internasional terutama oleh negara-negara barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya bagi kajian mata kuliah politik dan pemerintahan Timur Tengah.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang apa yang terjadi di Afghanistan
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pelengkap dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, A. (2011). PRINSIP PENGAKUAN DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU. *Lex Journalica*, 220-221.
- AamajNews. (2022). *Ten months of Taliban's rule: 81.5% of the cabinet composition and governors are Pashtuns and 98.4% of them are Taliban members, there is no woman and Hazara*. Aamaj News.
- Adela, & Susannah. (2021, October 21). *Taliban tells Kabul's female city government employees not to come to work*. Retrieved from Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/21/taliban-women-work-afghanistan/>
- Amsir, A. A. (2021). PERJANJIAN WESTPHALIA DAN MOMENTUM PENDIRIAN NEGARA MODERN. *Sulesana*, 53-54.
- Arbar, T. F. (2021). *Sah! Taliban Umumkan Pemerintah Baru, Ada yang Dicap Teroris*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Balairung Press. (2022, Maret 2). Retrieved Agustus 2022, 25, from Perempuan Afghanistan: Keterbatasan dan Kekhawatiran: <https://www.balairungpress.com/2022/03/perempuan-afghanistan-keterbatasan-dan-kekhawatiran/>
- BBCNews. (2014). *Afghanistan: Before and after the Taliban*. BBC News.
- BBCNews. (2019). *Who is Ashraf Ghani? The technocrat who sought to rebuild Afghanistan*. BBC News.
- BBCNews. (2021). *Afghanistan: Eks Presiden Ghani minta maaf kabur ke luar negeri demi 'selamatkan Kabul dan enam juta penduduknya'*. BBCNews Indonesia.
- BBCNews. (2021). *Mapping the advance of the Taliban in Afghanistan*. BBCNews.
- BBCNEWS. (2022, Agustus 12). *BBCNEWS*. Retrieved Agustus 25, 2022, from Who are the Taliban?: <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718>
- BBCNews. (n.d.). *Who are the Taliban?* BBC News.

- Bezhan, F. (2021). *Taliban's 'Mullahcratic' Government: Militants Fail To Form Inclusive Administration*. Gandhara.
- Bimo, E. S. (2022). *Laporan PBB: Taliban di Afghanistan Saat Ini Pening Kepala, Hadapi ISIS dan Kelompok Mantan Tentara*. New York: KompasTV.
- Boy, J. P. (2021). 13| Volume 9 n o 3 KONDISI POLITIK DAN KEAMANAN AFGHANISTAN DI BAWAH REZIM TALIBAN DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP GEOPOLITIK GLOBAL. *Jurnal Kajian Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 17-20.
- Brown, D., Faruki, Y., Igwe, A., Neville, A., & Roby, B. (2022). *A Year into Taliban Rule, Afghans Face Spiraling Economic, Humanitarian Crises*. Washington, DC: United State Institute of Peace.
- Clayton, T. (2021). *Taliban Government in Afghanistan: Background and Issues for Congress*. Congressional Research Service.
- CNN Indonesia. (2021). *Kronologi Krisis Kelaparan Afghanistan sampai Taliban Kehabisan Uang*. Jakarta: CNN Indonesia.
- CNNIndonesia. (2021). *Mengenal Jaringan Haqqani, Pilar Utama Ditakuti di Taliban*. CNN Indonesia.
- CNNIndonesia. (2021). *Taliban Berkuasa, Diplomat Afghanistan Memohon Suaka ke LN*. Jakarta: CNN Indonesia.
- CNNIndonesia. (2021). *Taliban Umumkan Hasan Akhund Pimpin Pemerintahan Afghanistan*. Jakarta: CNN Indonesia.
- CNNIndonesia. (2021). *Taliban: Tugas Wanita Melahirkan, Tak Bisa Jadi Menteri*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Crawford, J. (1993). *Democracy and International Law*. Britain Yearbook of International Law.
- Dominguez, G. (2013, October 10). *Taktik Pembunuhan ala Taliban*. Retrieved October 11, 2022, from DW Made For Minds: <https://www.dw.com/id/taktik-pembunuhan-ala-taliban/a-17009508>



- Dönmez, B. B. (2021). *Taliban umumkan pembentukan pemerintahan sementara di Afghanistan*. Ankara: Anadolu Agency Indonesia.
- Education, S. (2011). Afghanistan, the Taliban, and Osama bin Laden: The Background to September . *The Choices Program, Brown University*, 185-190.
- Eka Noviarini, T. R. (2022). PELANGGARAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN SELAMA KEKUASAAN REZIM TALIBAN BERDASARKAN KONVENSI CEDAW. *Reformasi Hukum Trisakti*.
- Elsa, F. Z., & Regika. (2020). Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari. *Journal of Judicial Review*, 168-169.
- Gardner, F. (2021). *Afghanistan: Mengapa penarikan pasukan Barat memicu kekhawatiran kembalinya al-Qaeda?* BBC News Indonesia.
- Gomez, J. (2014). Introduction: Democracy and Human Rights in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33, 7-9.
- Harruma, I. (2022). *Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993*. Jakarta: Kompas.
- Heriyanto, D. S. (2022). Legalitas Pergantian Kekuasaan Di Afghanistan Melalui Coup D'etat Oleh Taliban Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 8-19.
- Hidayat, M. C. (2018). EFEKTIVITAS NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DI AFGHANISTAN MELALUI INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE (ISAF) PERIODE 2003-2014. 42-54.
- History.com. (2018, 25 August). *September 11 attacks*. Retrieved from History.com: <https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks>
- HRW. (1998). *AFGHANISTAN: THE MASSACRE IN MAZAR-I SHARIF*. Human Rights Watch.
- Hugo, & Ali. (2021, December 8). *BBC World Service*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59560984>
- HumanRightsWatch. (2021). *Afghanistan Events of 2021*. New York: HumanRightsWatch.

- HumanRightsWatch. (2022). *Afghanistan: Taliban Deprive Women of Livelihoods, Identity*. New York: HumanRightsWatch.
- Jones, S. G. (2022). *Countering a Resurgent Terrorist Threat in Afghanistan*. Council On Foreign Relations.
- Katzenstein, P. (1996). *Introduction: Alternative Perspectives on National Security*. New York: COLUMBIA UNIVERSITY PRESS.
- Ketut Andri Sena, S. (2021, September 12). *Status Kenegaraan Afghanistan Pasca Pengambilalihan oleh Taliban*. Retrieved October 10, 2022, from Heylaw.edu: <https://heylawedu.id/blog/status-kenegaraan-afghanistan-pasca-pengambilalihan-oleh-taliban>
- KOMPAS. (2021). *Israel Cemas jika Taliban seperti Iran*.
- KOMPAS. (2021). *KEAMANAN PANGAN DI AFGHANISTAN MEMBURUK*.
- KOMPAS. (2021). *Musim Dingin yang Mengancam Warga Afghanistan*.
- Kompas. (2022). *Setahun Pemerintahan Taliban*. Kompas.
- Kumparan News. (2021). *Siapa Saja Negara yang Diduga Mendukung Taliban?* Kumparan News.
- Magnus, R. H. (1997). Afghanistan in 1996: Year of the Taliban. *Asian Survey*, 111-117.
- Mansfiel, D. (2021). *A Taxing Narrative: Miscalculating Revenues and Misunderstanding the Conflict in Afghanistan*. Afghanistan Research and Evaluation Unit.
- Noverikza, M. F. (2022). *IMPLIKASI PENGAMBILALIHAN PEMERINTAHAN AFGHANISTAN OLEH*. *Belli Ac Pacis*, 56.
- Pramadiba, I. M. (2021). *Amerika Beri Syarat ke Taliban Jika Ingin Diakui Sebagai Pemerintah Afghanistan*. Jakarta: Tempo.co.
- PROF. DR. S.M. NOOR, S. M. (2012, November 12). *Pengakuan Pemerintah Baru*. Retrieved October 21, 2022, from Negara Hukum: <https://www.negarahukum.com/pengakuan-pemerintah-baru.html>

- Putri, N. F. (2022, OKTOBER 7). *Perbedaan Pengakuan De Facto dan De Jure*. Retrieved October 10, 2022, from iNEWS.ID: <https://www.inews.id/news/nasional/perbedaan-pengakuan-de-facto-dan-de-jure-ini-penjelasan-lengkapny/2>
- Republika. (2021). *Taliban Hapus Kementerian Urusan Perempuan*. Kabul: Republika.co.id.
- Republika. (2022). *AS dan Eropa Mulai Berunding dengan Taliban*.
- Rezvani, A., Harbage, C., & Fazelminallah Qazizai, N. (2002). *Afghans are bracing for a winter many fear will be even worse than the last*. Kabul: MPR News.
- Saufa Ata Taqiyya, S. (2022, April 11). *Apa Saja Unsur-unsur Berdirinya Negara?* Retrieved October 21, 2022, from HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-unsur-unsur-berdirinya-negara-lt62518327e2b93>
- Sena, K. A. (2021, September 12). *Status Kenegaraan Afghanistan Pasca Pengambilalihan oleh Taliban*. Retrieved October 10, 2022, from Heylaw.edu: <https://heylawedu.id/blog/status-kenegaraan-afghanistan-pasca-pengambilalihan-oleh-taliban>
- Sorong, T. (2021). *9 Negara Mulai Komunikasi dengan Taliban, Ini Daftarnya*. CNBCIndonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatmoko, A. (2020). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tandiono, P. (2014). STATUS KENEGARAAN (STATEHOOD) NEGARA –NEGARA KEPULAUAN BERDATARAN RENDAH (LOW-LYING ISLAND NATIONS) YANG SELURUH WILAYAHNYA TERENDAM AIR LAUT . *Jurnal Ilmiah*, 9.
- Teun van Dongen, J. F.-M. (2022). *One Year of Taliban Rule in Afghanistan: A Predictable Disaster*. International Centre for Counter Terrorism.
- The Washington Posts. (2001, September 20). *The Washington Posts*. Retrieved from Text: President Bush Addresses the Nation,: [https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress\\_092001.html](https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html)
- TheJakartaPost. (2021, August 17). *The rise and fall of Afghan President Ashraf Ghani*. Retrieved from The Jakarta Post:

<https://www.thejakartapost.com/news/2021/08/17/the-rise-and-fall-of-afghan-president-ashraf-ghani-.html>

Thomas, C. (2022). *Afghanistan: Background and U.S. Policy in Brief*. Congressional Research Service.

Todd Landman, “. a. (2018). *Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships*.

Tristram, P. (1996). *Bin Laden's Declaration of War on the United*.

UNAMA. (2022, March 2). *BRIEFING BY SPECIAL REPRESENTATIVE DEBORAH LYONS TO THE SECURITY COUNCIL*. Retrieved from UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN: <https://unama.unmissions.org/briefing-special-representative-deborah-lyons-security-council-14>

UNNews. (2022, Agustus 15). Retrieved Agustus 25, 2022, from ‘We can’t turn our backs on Afghanistan’s future’: A Resident Coordinator Blog: <https://news.un.org/en/story/2022/08/1124632>

UNWomen. (2021). *Gender Alert I: Women’s Rights in Afghanistan: Where Are We Now?*

Wardhana, E. F. (2021). *Pastikan Keamanan Warganya, Dubes Jepang Temui Pejabat Taliban di Kabul*. SindoNews

Wardhana, E. F. (2022). *Taliban Ingin Ciptakan Struktur Militer yang Kuat untuk Afghanistan*. SindoNews International.

Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.

Wicaksana, I. G. (2018). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif klasik*. Surabaya: Airlangga University Press.

World Food Programme. (2022). *Afghanistan Situation Report*. World Food Programme.

Yusufzai, R. (2018). 16 Years of US Presence in Afghanistan: Objectives, Strategies and Emerging Scenario. *The Journal of the Institute of Policy Studies* 15, 139-141.